



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR: 180-640-2025

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 180-76-2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 180-76-2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 180-564-2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 180-76-2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2025;
- b. bahwa dengan adanya usulan rancangan Peraturan Gubernur dari perangkat daerah pemrakarsa, perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Program Pembentukan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor 180-76-2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

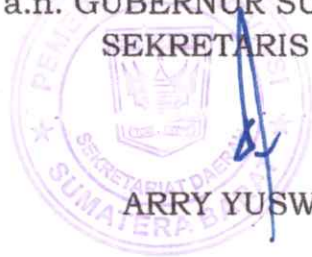
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-76-2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2025, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 180-564-2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 180-76-2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 September 2025
a.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



ARRY YUSWANDI

Tembusan:
Gubernur Sumatera Barat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 180- 640 -2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR NOMOR 180-76-2025 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2025

NO.	JUDUL RANPERGUB	OPD PEMRAKARSA
1.	Roadmap Sanitasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	BAPPEDA
2.	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat 2025	BAPENDA
3.	Sistem Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	BIRO ORGANISASI
4.	Penunjukan Petugas Pelaksana Pelayanan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Mutu Produk Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
5.	Komoditas Unggulan Perkebunan, Gambir, Penguatan Kelembagaan Usaha, Perkebunan dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif	DINAS PERKEBUNAN DAN TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA
6.	Penyelenggara Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Secara Terintegrasi/Corporate University pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (ASN Sumbar Corpu)	BPSDM
7.	Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis	DINAS KESEHATAN
8.	Pola Tata Kelola Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal 3 (Tiga) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	BAPPEDA
9.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	DINAS KEARSIPAN

10.	Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Provinsi	DINAS PERHUBUNGAN
11.	Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi di Daerah	DINAS SDA & BK
12.	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, Dan Standar Pelayanan Minimal 8 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	BIRO PEREKONOMIAN
13.	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KOPERASI DAN UKM
14.	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
15.	Harga Satuan Pokok Kegiatan	BPKAD
16.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah	DINAS KESEHATAN
17.	Tertib Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	BKD
18.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.	BAPPEDA
19.	Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah.	BALITBANG
20.	Pencabutan Peraturan Gubernur Momor 44 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pelabuhan Carocok Painan	DINAS PERHUBUNGAN
21.	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	BKD
22.	Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	BKD
23.	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.	BPKAD

24.	Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	BPBD
25.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana.	BPBD
26.	Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	SATPOL PP
27.	Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat	SATPOL PP
28.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari.	DPMD
29.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender.	DP3AP2KB
30.	Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.	DISNAKERTRANS
31.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Pangan.	DINAS PANGAN
32.	Rumah Sakit Khusus Mata.	DINAS KESEHATAN
33.	Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2026-2030.	BPBD
34.	Rencana Kontingensi Gempa dan Tsunami.	BPBD
35.	Rencana Kontingensi Banjir 8 DAS.	BPBD
36.	Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Api Merapi.	BPBD
37.	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	DISNAKERTRANS
38.	Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	DPMPTSP
39.	Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Perizinan, Pengaduan dan Pengawasan).	DPMPTSP
40.	Pelaksanaan Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.	DPMPTSP

4.1.	Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).	DPMPTSP
4.2.	Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029.	BIRO PEMERINTAHAN
4.3.	Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	BIRO ORGANISASI
4.4.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur.	BIRO ORGANISASI
4.5.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.	BIRO ORGANISASI
4.6.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan.	BIRO ORGANISASI
4.7.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.	BIRO ORGANISASI
4.8.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	BKD
4.9.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah.	BPKAD
5.0.	Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	BIRO ORGANISASI
5.1.	Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Daerah.	BPKAD
5.2.	Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029.	BAPPEDA
5.3.	Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2029.	BAPPEDA

54.	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029.	BAPPEDA
55.	Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
56.	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pola Kontribusi dan Pola Fasilitasi.	BPSDM
57.	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.	ESDM
58.	Tata Cara Pemberian Hibah.	BPKAD
59.	Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.	DINAS KOPERASI DAN UKM
60.	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan.	BPKAD
61.	Tata Cara Penerimaan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
62.	Tata Cara Dan Mekanisme Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Bagi Murid Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.	DINAS PENDIDIKAN
63.	Satuan Pendidikan Aman Bencana	DINAS PENDIDIKAN
64.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	BAPPEDA
65.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	BAPPEDA
66.	Pedoman Pelayanan Tamu Pimpinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	BIRO UMUM

a.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,


ARRY YUSWANDI